



## Komite Penasehat Pemangku Kepentingan (SAC)

### Kebijakan APRIL dalam Pengelolaan Hutan Berkelanjutan 2.0 (SFMP 2.0)

– Rapat SAC ke-11 di Pangkalan Kerinci, Riau - Indonesia, 12-15 September 2017 –

<b>ANGGOTA SAC</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Joe Lawson (Ketua)</li><li>2. Al Azhar</li><li>3. Prof. Jeffrey Sayer</li><li>4. Dr. Neil Byron</li><li>5. Ibu Erna Witoelar</li></ol>
<b>TURUT HADIR</b>	Seorang mahasiswa S3 menghadiri beberapa sesi sebagai peninjau. Seorang perwakilan dari KPMG PRI juga menghadiri rapat ini sebagai ahli teknis.
<b>TOPIK-TOPIK DISKUSI</b>	
<b>Kata Pembuka dan Tinjauan Umum</b> <p>APRIL terus menunjukkan kemajuan secara signifikan dalam mensukseskan implementasi SFMP 2.0. Hasil dari audit <i>assurance</i> pihak ketiga serta masukan yang diberikan oleh para pemangku kepentingan lokal baru-baru ini juga sangat menjanjikan. SAC memuji upaya APRIL dan sepenuhnya menyadari bahwa hasil positif yang dicapai merupakan cerminan upaya yang sungguh-sungguh dari para staff dan mitra. Mengingat masih adanya tantangan di lapangan, maka akan selalu ada peluang untuk perbaikan. SAC memulai diskusi dan rekomendasi dengan semangat ingin membantu dan mendampingi APRIL untuk terus menjadi lebih baik.</p>	
<b>1. Forum Pemangku Kepentingan SAC</b> <p>SAC bertemu dengan 28 perwakilan dari masyarakat sipil, akademisi dan pemerintah di Pekanbaru. Bersama dengan perwakilan dari KPMG, SAC memberikan gambaran dan penjelasan tentang audit <i>assurance</i> yang berlangsung pada tahun 2016 dan 2017, dan mengundang para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan terhadap sekumpulan draf indikator yang akan digunakan pada audit <i>assurance</i> di tahun 2018. Indikator-indikator ini dikembangkan oleh KPMG dengan didasari oleh masukan dari SAC dan masukan awal dari para pemangku kepentingan yang diterima dalam forum di bulan Maret 2017.</p> <p>Untuk informasi lebih lanjut, dapat dilihat di laporan pertemuan terpisah.</p>	
<b>2. Informasi Terkini tentang IPEWG</b> <p>Prof. Chris Evans, salah satu anggota dari Kelompok Ahli Gambut Independen (<i>Independent Peat Expert Working Group/IPEWG</i>) memberikan informasi terkini kepada SAC terkait pertemuan IPEWG yang dilaksanakan pada 7-8 September. Seiring dengan diterbitkannya Ikhtisar Peta Jalan dan Rencana Kerja Gambut APRIL-IPEWG (<a href="#">APRIL-IPEWG Peatland Roadmap and Workplan Overview</a>), tiga komponen di bawah ini terus dikerjakan oleh IPEWG:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Membangun pemahaman yang berasaskan sains dan meminimalisir dampak terhadap lahan gambut;</li></ul>	

- Meninjau dan memantau praktek-praktek yang bertanggung jawab, termasuk model tata kelola air di lahan gambut;
- Mendukung perkembangan visi pengelolaan lahan gambut melalui pendekatan dan potensi kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya.

Saat ini, IPEWG memberikan saran dan bekerja bersama APRIL dalam:

- Menyusun draf makalah mengenai analisa IPEWG akan penurunan permukaan tanah;
- Perancangan dan pelaksanaan uji coba di lapangan untuk mempelajari dampak kenaikan permukaan air, dengan kombinasi akan keberadaan unsur hara, terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup tanaman akasia, kondisi lahan gambut dan keseimbangan karbon;
- Percobaan spesies tumbuhan alternatif;
- Program pengukuran fluks gas rumah kaca;
- LiDAR dan pendekatan penginderaan jarak jauh (*remote sensing*) lainnya;
- Masukan terhadap penggunaan model hidrologi (MIKE-SHE) oleh APRIL; dan
- Program Pengelolaan Hutan Konservasi.

Pada pertemuan selanjutnya di bulan November, IPEWG bermaksud untuk menghasilkan sebuah laporan publik perihal kemajuan seiring dengan berakhirnya tugas amanat 2-tahun pertama IPEWG, dan untuk berdiskusi dengan APRIL dan SAC terkait area fokus utama di periode selanjutnya.

### 3. Kerangka Peraturan terkait Lahan Gambut

Sejak awal mula SAC terbentuk, SAC telah memperhatikan isu seputar produksi kayu di lahan gambut. SAC menyambut baik dan sependapat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait tujuan jangka panjang konservasi dan restorasi lahan gambut. SAC juga menyadari tantangan yang besar bagi industri kehutanan saat ini, khususnya bagi APRIL. SAC mencatat adanya arahan dari Presiden Joko Widodo bahwa peraturan hendaknya harus mempertimbangkan dampak ekonomi dari perlindungan gambut.<sup>1</sup> SAC percaya akan pentingnya memiliki visi jangka panjang dalam pengelolaan lahan gambut berkelanjutan yang memperhatikan kelestarian lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Visi jangka panjang ini harus merupakan hasil konsultasi antara para pemangku kepentingan terkait di Indonesia.

SAC berharap bahwa seluruh diskusi yang sedang berlangsung saat ini baik di pemerintahan Indonesia maupun pemangku kepentingan lainnya, termasuk APRIL, akan menghasilkan identifikasi pilihan-pilihan untuk mencapai tujuan jangka panjang perlindungan lahan gambut, dan secara bersamaan, menghindari timbulnya gangguan terhadap perekonomian dan kehidupan masyarakat lokal.

SAC menyetujui langkah dan pendekatan yang sudah diambil oleh manajemen APRIL untuk menjelajahi pilihan dengan meningkatkan produksi kayu dari tanah mineral, seperti program Hutan Rakyat (*community tree-farming/HR*). SAC juga mencatat bahwa kemajuan lebih lanjut untuk meningkatkan produksi kayu dari lahan mineral akan bergantung pada upaya KLHK dalam menjalankan program “pertukaran lahan (*land swaps*)”. SAC berharap areal untuk program “pertukaran lahan” ini ditemukan secepat mungkin.

---

<sup>1</sup> [“Now is time to attract investments,”](#) *The Jakarta Post*, 29 August, 2017 & [“Jokowi tells ministers to support businesses,”](#) *The Jakarta Post*, 25 July, 2017

SAC juga menambahkan bahwa dalam mengimplementasikan peraturan terkait lahan gambut harus memberikan periode transisi untuk menghindari kemungkinan vakumnya tata kelola yang dapat memberikan celah terjadinya perambahan secara besar-besaran.

SAC mendukung intensifikasi program-program yang sudah dicanangkan oleh IPEWG dengan sebuah fokus pada identifikasi pilihan tata kelola yang dapat ditindaklanjuti serta pendalaman pemahaman terhadap dampak dari perbedaan strategi terkait sumber daya lahan gambut dengan industri dan masyarakat yang bergantung terhadapnya. SAC berharap IPEWG dapat berinteraksi secara lebih luas dengan para ilmuwan lahan gambut Indonesia, Badan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di daerah dan badan pemerintahan pusat, termasuk BRG .

### Rekomendasi

1. SAC meminta APRIL untuk terus melanjutkan pengembangan terhadap interpretasi operasional terkait peraturan lahan gambut dan mengkomunikasikannya dengan SAC dan IPEWG, termasuk:
  - a. Pengaturan pedoman di sistem APRIL untuk memastikan kepatuhan di seluruh konsesi, dan
  - b. Sistem APRIL untuk mengelola komunikasi dengan pemasok dan memastikan kesesuaian pemasok dengan pedoman yang ada.
2. SAC mendukung kelanjutan upaya pengembangan produksi kayu berbasis masyarakat di area lahan mineral yang sekiranya akan tersedia sebagai hasil dari kebijakan pertukaran lahan.

### 4. Kepatuhan pemasok

APRIL memberikan informasi terkini kepada SAC perihal implementasi Prosedur Operasi Standar (*Standard Operating Procedure/SOP*) terkait kepatuhan pemasok dengan SFMP 2.0, termasuk sosialisasi SFMP 2.0 yang tengah berlangsung, dan pemantauan kepatuhan. APRIL mengakui adanya tantangan dalam mendapatkan data-data dasar yang lengkap dari para pemasok pasar terbuka (*open-market suppliers*) yang dimana hal tersebut terus ditindaklanjuti melalui sosialisasi dan verifikasi lapangan. Pemantauan perubahan lahan dilakukan kepada seluruh pemasok sejak dimulainya kontrak dan hal ini telah membantu pemantauan perubahan-perubahan serta alasannya.

APRIL telah melakukan perbaikan signifikan dalam kualitas data dari para pemasok. SAC dan APRIL mencatat adanya kesempatan untuk merasionalisasikan pendekatan terkait pemantauan kepatuhan para pemasok, menyarankan bahwa APRIL juga harus melakukan pendekatan melalui pengaruh komersil.

SAC sebelumnya telah menyarankan bahwa semua pemasok harus memenuhi standar kepatuhan terhadap SFMP 2.0 dan SAC tetap berada pada posisi yang sama. Namun demikian, untuk pelaporan progres dalam mencapai kepatuhan terhadap SFMP 2.0, menjadi jelas bahwa akan lebih bermanfaat jika progres dilacak secara terpisah dengan tipe pemasok pertama, yaitu pemasok yang memiliki hubungan kontrak jangka panjang dengan APRIL, yang berlokasi di Riau dan sedikit banyak dapat dipengaruhi oleh APRIL, dibandingkan dengan tipe pemasok kedua, yaitu pemasok yang independen, yang menjual kayu di pasaran dan hanya memiliki kontrak tahunan dengan APRIL. Penyediaan data kepatuhan berkualitas tinggi berjalan dengan baik pada tipe pemasok pertama, namun tantangan-tantangan yang signifikan masih terjadi dalam upaya mendapatkan data kepatuhan yang memadai dari beberapa tipe pemasok kedua. Untuk mengatasi hal ini, APRIL telah mengembangkan dan sedang mengimplementasikan sebuah sistem pemantauan internal.

SAC mengakui adanya tantangan-tantangan tersebut namun tetap merupakan suatu hal yang penting dalam implementasi SFMP 2.0 untuk bisa mendapatkan data kepatuhan yang akurat dan tepat waktu dari seluruh

pemasok.

### Rekomendasi

Hanya terbatas kepada hal-hal terkait pelaporan, SAC menyarankan penggunaan istilah “pemasok pasar terbuka” (“*open-market suppliers*”) untuk menggantikan istilah pemasok jangka pendek, dan “mitra pemasok” (“*supply partners*”) untuk merujuk pada pemasok jangka panjang.

APRIL harus mengevaluasi kembali dan meningkatkan sistem yang ada saat ini untuk mendapatkan data kepatuhan dari para pemasok. Hal ini dapat mencakup strategi komunikasi yang lebih kuat dan sebuah sistem yang lebih baik untuk memprioritaskan para pemasok yang memiliki risiko-risiko lingkungan dan sosial terbesar.

Selain itu, SAC menegaskan bahwa pemasok-pemasok pasar terbuka yang secara konsisten enggan atau tidak dapat memenuhi kepatuhan SFMP 2.0 agar diberhentikan sebagai pemasok.

## 5. Perencanaan konservasi hutan

APRIL mempresentasikan status kerangka kerja pengelolaan konservasi hutan yang bertujuan untuk memperkuat pengelolaan di level estate atas perancangan areal konservasi di dalam konsensi. APRIL mendasarkan kerangka kerja ini pada penilaian-penilaian Nilai Konservasi Tinggi (High Conservation Value/HCV) yang telah ada dan menggabungkan sejumlah analisis (cakupan lahan, penyangga dan inti, patch prioritization, dan konektivitas estate/bentang alam) menggunakan toolkit Stok Karbon Tinggi (High Carbon Stock/HCS), dan masukan dari masyarakat melalui Persetujuan atas dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (Free Prior and Informed Consent/FPIC) dan pemetaan partisipatif. Pengelolaan berencana level estate akan mengikutsertakan identifikasi-identifikasi adanya ancaman, deskripsi tindakan, indikator-indikator untuk mengukur progres dan batas waktu penyelesaian. Setelah selesainya studi contoh di salah satu konsensi RAPP, APRIL akan mulai melakukan program yang sama di seluruh lahan perkebunannya pada akhir 2017, dan memperluasnya ke mitra pemasok pada 2018.

SAC menyambut baik integrasi peran dan dampak kegiatan masyarakat ke dalam kerangka kerja, bersamaan dengan pembelajaran-pembelajaran tambahan yang didapati dari Program Desa Bebas Api.

SAC juga mencatat bahwa konservasi bentang alam lahan gambut yang terletak di dalam areal konsensi Adindo di Kalimantan Utara terus menarik perhatian LSM pemangku kepentingan.

### Rekomendasi

SAC merekomendasikan untuk memprioritaskan rencana pengelolaan konservasi lahan yang berdekatan dengan bentang alam yang rentan (contohnya, Kerumutan).

SAC juga merekomendasikan APRIL untuk mengkaji kondisi lahan gambut terkini di konsensi Adindo dan melaporkan informasi tersebut kepada SAC pada rapat selanjutnya.

## 6. Pengelolaan kebakaran strategis

SAC menghargai upaya terus-menerus APRIL dalam manajemen kebakaran strategis. Data dari tahun ke tahun sejak 2013 menunjukkan sebuah penurunan drastis dalam rata-rata ukuran lahan yang terbakar di areal konsensi APRIL, didorong oleh peningkatan fokus pada pencegahan, pendeteksian dini dan respon yang cepat dalam peredaman. Namun saat ini, data yang dimiliki APRIL hanya mencakupi lahan konsensi milik APRIL dan

mitra pemasoknya.

Program Desa Bebas Api (Fire Free Village Program/FFVP) terus diperkaya melalui sejumlah kegiatan seperti “Fire Aware Goes to School” yang melibatkan materi-materi publikasi pendidikan terkait dampak negatif dari kebakaran dan kabut asap untuk didistribusikan ke siswa-siswi sekolah dasar di desa-desa yang tergabung sebagai peserta program ini. APRIL juga menyelenggarakan “Fire Aware Goes to the Movies”, di mana pemutaran film dikombinasikan dengan film-film animasi yang dapat meningkatkan kepedulian serta cuplikan-cuplikan dokumentasi.

Aliansi Bebas Api (Fire Free Alliance/FFA) merencanakan lokakarya selanjutnya pada bulan Oktober/November dimana pengembangan-pengembangan pada toolkit risiko kebakaran akan didiskusikan.

Rekomendasi

APRIL harus terus menekan pemasok-pemasok pasar terbuka agar mereka memberikan data insiden kebakaran dan terus mendukung sosialisasi lebih luas terkait pencegahan kebakaran dengan pihak ketiga terkait.

## 7. Informasi Terkini tentang Rainforest Alliance

Rainforest Alliance melaporkan temuan awal atas analisis kesenjangan (gap analysis) internal APRIL terhadap standar FSC Controlled Wood, berdasarkan kunjungan lapangan di enam unit pengelolaan hutan. Ketika laporan tersebut difinalisasi, sebuah ringkasan laporan internal akan diluncurkan, mengikuti kajian dan masukan dari SAC.

## 8. Informasi Terkini tentang PT. SAU

APRIL memberikan informasi terkini terkait insiden PT. SAU yang didiskusikan pada rapat SAC sebelumnya. Berdasarkan laporan PT. SAU, pertemuan antara perwakilan masyarakat Desa Teluk Binjau dan PT. SAU yang pada mulanya dijadwalkan pada bulan Mei mengalami penundaan dikarenakan perwakilan masyarakat tersebut berhalangan. Pada saat bersamaan, PT. SAU telah melakukan revisi SOP untuk Pengendalian Protes Massa, merujuk pada regulasi Kepolisian Indonesia (Peraturan Kapolri) No. 16/2006.

## 9. Diskusi terkait pelaporan insiden

Walaupun SAC mengakui beberapa perkembangan pada pelaporan insiden terkait kepatuhan terhadap SFMP 2.0, SAC mengingatkan APRIL agar lebih proaktif dalam menginformasikan insiden tersebut, termasuk hal-hal yang mungkin telah diselesaikan oleh perusahaan.

## 10. Proses FSC

APRIL memberikan gambaran umum tentang keterlibatannya saat ini dengan Sekretariat FSC terkait dengan proses Peta Jalan (Roadmap) untuk mengakhiri disosiasi.

## 11. Laporan Audit Assurance KPMG

KPMG PRI melaporkan kepada SAC temuan-temuan utama dari audit penutupan Rencana Aksi 2016 dan audit interim 2017 mengenai kepatuhan SFMP 2.0. Laporan yang berisikan kedua audit tersebut akan diluncurkan oleh SAC pada akhir September.

## 12. Diskusi tentang Perambahan

Saat ini, SAC memberikan perhatian terhadap jumlah perambahan yang terus bertambah di penjuror bentang alam hutan Indonesia yang juga berdampak pada konsesi APRIL. Dalam beberapa kasus, permasalahan berakut pada sengketa hak dan/atau kepemilikan lahan, yang dimana resolusi atas kasus tersebut berada di luar kendali APRIL dan harus melibatkan intervensi dari pemerintah. APRIL terus meningkatkan pemahamannya atas permasalahan tersebut melalui keterlibatan masyarakat, pemantauan perubahan lahan dan penghimpunan data secara reguler. Meskipun SAC menyambut baik kenyataan bahwa APRIL telah mengembangkan basis data (database) internalnya untuk mengetahui sengketa-sengketa lahan secara lebih akurat, dampak-dampak serius dari permasalahan tersebut membutuhkan upaya bersama untuk mencegah meluasnya perambahan.

### Rekomendasi

Menetapkan garis dasar (baseline): APRIL harus terus mengembangkan sistem manajemennya untuk merekam dan menangani perambahan, ketika sejumlah area telah diidentifikasi melalui pemantauan perubahan lahan atau alat lainnya. Hal ini termasuk sebuah sistem untuk memprioritaskan kasus-kasus, contohnya di mana jika ada hutan alam yang terancam.

Membangun aliansi: Lebih lanjut, SAC memahami bahwa APRIL memiliki kapasitas terbatas untuk mengatasi permasalahan perambahan seorang diri. SAC menghimbau APRIL untuk membangun aliansi dengan pemerintah setempat yang bertanggung jawab untuk mengatasi konflik lahan hutan (KPH, Dinas LHK). LSM setempat memiliki potensi untuk berperan dalam menemukan mekanisme-mekanisme resolusi alternatif persengketaan. Aliansi ini bukan merupakan "inisiatif APRIL," namun APRIL harus dilibatkan. Untuk melakukan hal ini secara efektif, APRIL sekiranya akan membutuhkan pengembangan kapasitas tambahan di tim manajemennya.

## 13. Hutan Rakyat (Community Tree Farms/HR)

SAC menyambut baik laporan terkait progres dua proyek awal Hutan Rakyat di tanah mineral yang berlokasi di lahan pribadi yang dimiliki oleh masyarakat. APRIL masih dalam proses melibatkan mitra untuk melaksanakan penilaian HCS pada area tersebut dan sebuah mitra LSM sosial untuk pelibatan dengan masyarakat. SAC sangat mendukung APRIL dalam melaksanakan proyek percontohan awal ini.

## 14. Hal-hal lainnya

SAC mengkaji ulang Kerangka Acuan Kerja (Terms of Reference/ToR), yang akan tersedia pada website APRIL.

SAC akan mempublikasikan sebuah ringkasan progres tahun 2016-2017, meliputi pencapaian serta tantangan-tantangan di masa mendatang. SAC akan terus mencari tambahan keanggotaan Indonesia untuk bergabung ke komite.

SAC telah berdiskusi mengenai sejumlah inisiatif APRIL dan kebutuhan akan koordinasi yang lebih baik dibawah pengawasan SAC.

## RAPAT SAC SELANJUTNYA

Lokasi : ditentukan kemudian

Waktu : Februari 2018